

Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syi'ah Terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran di Timur Tengah

Afina Nurdina Utami¹, Syaiful Anam¹, Ahmad Mubarak Munir¹

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram, NTB, Indonesia

dinaafeen@gmail.com

ABSTRACT

The breakdown of Saudi Arabia and Iranian bilateral relations in 2016 was a sign of tension that was straining between Saudi Arabia and Iran. The constructive conflict has always affected relations between Saudi Arabia and Iran, especially since 1979. This study aims to explain that the root cause of the tension between Saudi Arabia and Iran in the Middle East is due to non-material factors. In this research, the author describes the history of Sunni-Shiites' formation, the implementation of ideologies in Saudi Arabia and Iran, and relations between Saudi Arabia and Iran after the Iranian Revolution. Next, the author analyzes them with a constructivist approach to better understand conflictual relations between the two countries. This study uses qualitative research methods and the method of data collection through reference literature studies. The Iranian Islamic Revolution of 1979 was an event that became the starting point where the relations between the two countries became tense. After the revolution, Iran made Shiism its ideology and the basis of its country. According to constructivism, the changing identity of Iran into a theocratic state of Shiism has changed the way Saudi Arabia and Iran view each other. This is due to the ideological conflict held by the two countries, Saudi Arabia with the Sunnis, and Iran with the Shiites. The debate affected relations between Saudi Arabia and Iran and the two countries in the Middle East.

Keywords: Constructivism, Iran, Saudi Arabia, Shiite, Sunni.

ABSTRAK

Putusnya hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran pada tahun 2016 menjadikan pertanda kembalinya ketegangan antara hubungan Arab Saudi dan Iran. Hubungan konflikual selalu mewarnai hubungan antara Arab Saudi dan Iran, terutama pasca 1979. Revolusi Islam Iran 1979 adalah sebuah peristiwa yang menjadi titik mula dimana hubungan kedua negara menjadi tegang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa akar penyebab dari ketegangan antara Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah ini disebabkan karena faktor-faktor non-material. Dalam penelitian ini, penulis menjabarkan mengenai sejarah terbentuknya Sunni-Syi'ah, penerapannya dalam Negara Arab Saudi dan Iran, serta hubungan Arab Saudi dan Iran pasca Revolusi Iran. Selanjutnya, penulis menganalisisnya dengan pendekatan konstruktivisme untuk dapat memahami lebih baik hubungan konflikual antar kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka. Pasca revolusi, Iran menjadikan ideologi Syi'ah sebagai dasar negaranya. Berubahnya identitas Iran menjadi negara teokratis Syi'ah ini mengubah cara pandang Arab Saudi dan Iran terhadap satu sama lain. Hal ini disebabkan karena pertentangan ideologi yang dianut oleh kedua negara, Arab Saudi dengan Sunni, dan Iran dengan Syi'ah. Pertentangan ini kemudian mempengaruhi hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran dan juga hubungan kedua negara di kawasan Timur Tengah.

Kata Kunci: Arab Saudi, Iran, Konstruktivisme, Sunni, Syi'ah.

PENDAHULUAN

Hubungan antara Arab Saudi dan Iran bersifat fluktuatif. Pada awal terbentuknya Arab Saudi dan Iran sebagai sebuah negara, hubungan bilateral kedua negara berjalan

dengan baik. Arab Saudi dan Iran menandatangani *Saudi-Iranian Friendship Treaty* pada tahun 1929. Perjanjian tersebut berisi tentang prinsip dasar dalam membangun hubungan politik, diplomatik, dan perdagangan diantara kedua negara. Perjanjian ini berjalan relatif stabil hingga tahun 1943 (Grumet, 2015, p. 43). Pada 1979, terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi negara Iran, yaitu terjadinya Republik Islam Iran. Revolusi ini berhasil menumbangkan pemerintahan sebelumnya di Iran yang sekuler di bawah kepemimpinan Syah Pahlevi menjadi pemerintahan yang teokratik Syi'ah dibawah kepemimpinan Imam Khomeini. Sejak tahun 1979, identitas menjadi faktor penting yang mempengaruhi pandangan Arab Saudi dan Iran terhadap satu sama lain. Elemen terpenting dari identitas kedua negara adalah agama.

Agama merupakan sumber legitimasi dari Kerajaan Saudi Arabia dan rezim Ayatullah di Iran (Huwaidin, 2015, p. 71). Kedua negara merupakan negara yang sama-sama menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik bernegara mereka. Akan tetapi, implementasi agama antara kedua negara bersumber dari dua ideologi yang berbeda yang memiliki peparuh signifikan bagi kedua negara. Pasca Revolusi Iran, hubungan Arab Saudi dan Iran terus mengalami keretakan. Dimulai pada tahun 1980-an saat berkobarnya perang Iran-Irak. Konflik Iran-Irak melibatkan emosional mazhab, dimana diyakini sebagai bentuk benturan mazhab Syi'ah-Sunni pasca revolusi 1979 (Sahide, 2013a, p. 93).

Arab Saudi dan Iran memang tidak langsung terlibat dalam konflik terbuka, melainkan melalui *proxy war* yang terjadi di Suriah, Irak dan Yaman. Dalam perang-perang tersebut dapat dicermati bahwa Arab Saudi dan Iran memposisikan diri di dua pihak yang berbeda. Dapat dilihat pula bahwa konflik-konflik dan ketegangan antara Saudi dan Iran ini tidak lepas dari isu Sunni-Syi'ah. Kedua negara dalam mengambil posisinya selalu memperhatikan dengan kelompok ideologi mana mereka berdiri. Hal ini membuktikan bahwa jurang perbedaan Sunni-Syi'ah ini memiliki pengaruh sangat besar bagi dinamika hubungan Arab Saudi dan Iran di kawasan.

Dari uraian di atas, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana pengaruh pertentangan ideologi Sunni-Syi'ah terhadap dinamika hubungan bilateral Arab Saudi-Iran di Timur Tengah?" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan memberikan eksplanasi terhadap ketegangan hubungan diplomatik antara kedua negara tersebut di kawasan Timur Tengah yang dilandasi oleh faktor idedntitas ideologi.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan antara Arab Saudi dan Iran dalam penelitian ini dikaji menggunakan beberapa literatur terdahulu. Di dalam penelitian terdahulu, penulis menggunakan beberapa sumber bacaan utama, diantaranya: artikel Mahdi Mohammad Nia dan Abdulmajid Seifi dalam yang berjudul '*The Ideational Nature of Iranian-Saudi Interaction*'. Nia menjelaskan bahwa, identitas memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku kebijakan luar negeri Arab Saudi dan Iran. Dalam artikelnya, Nia mengupas hubungan Arab Saudi dan Iran dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme juga. Akan tetapi, Nia tidak mengalamatkan hal tersebut kepada perbedaan ideologi Sunni-Syi'ah, namun lebih kepada sumber-sumber ideasional secara umumnya.

Adapun mengenai rivalitas yang ditunjukkan oleh Arab-Saudi dan Iran dibahas dalam sebuah artikel berjudul “*The Saudi-Iranian Rivalry: A Foreign Policy Analysis Approach*” yang ditulis oleh Usjid U Hameed dalam *Towson University Journal of International Affairs*, Vol. L, No. 2, Spring 2017. Dalam artikelnya, Hameed menganalisis hubungan rivalitas yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran melalui kaca mata analisis kebijakan luar negeri sebagai penengah dari realisme dan konstruktivisme. Sebagaimana penelitian ini, artikel ini membahas tentang persaingan antara Arab Saudi dan Iran. Artikel ini mampu memberikan gambar mengenai hubungan rivalitas kedua negara (Hameed, 2017). Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada artikel ini tidak dibahas mendalam mengenai Sunni dan Syi’ah, serta kaca mata yang digunakan dalam analisisnya adalah konsep kebijakan luar negeri

Rujukan selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Sahide yang berjudul “Ketegangan Politik Sunni-Syi’ah di Timur Tengah: Sejarah Politik di sekitar Laut Tengah Pada Abad X M”. Buku ini menjelaskan tentang aspek historis dari pertentangan ideologi Sunni-Syi’ah yang benih-benihnya tumbuh sejak kematian Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan politik di Timur Tengah hingga saat ini (Sahide, 2013a). Perbedaan karya Ahmad Sahide dengan penelitian ini adalah buku tersebut membahas konflik Sunni-Syi’ah ini dengan mengambil contoh antara Iran-Mesir sedangkan penelitian ini membahas Iran-Arab Saudi.

Mengenai perbedaan Sunni dan Syi’ah, penulis menggunakan referensi dari buku “Siapa Bilang Sunni-Syi’ah Tidak Bisa Bersatu” yang ditulis oleh Prof. Dr. Ahmad Bin Sa’ad al-Ghamidi dan artikel dari Emad Khalili dalam *International Academic Journal of Humanities* Volume 3, No. 4, 2016, yang berjudul ‘*Sects in Islam: Sunnis and Shias*’ (Al-Ghamidi, 2009; Khalili, 2014). Perbedaan yang menimbulkan jurang perbedaan antara Sunni-dan Syi’ah adalah konsep imamah yang diyakini oleh Syi’ah. Bagi Syi’ah, konsep imamah adalah sesuatu yang sangat esensial dan fundamental. Menurut Syi’ah, siapa yang mengingkari imamah dan mengingkari salah seorang imam yang ada maka ia dinyatakan telah kafir. Akan tetapi, Syi’ah memiliki beberapa cabang diantaranya adalah Itsna ‘Asyariyah, Ismailiyah, dan Zaidiyah. Adapun cabang Syi’ah yang digunakan sebagai dasar negara Iran adalah Itsna ‘Asyariyah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2017). Disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Studi Pustaka. Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh penulisdengan mengumpulkan data melalui buku, jurnal, artikel, majalah, berita dan sumber-sumber lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sumber-sumber pustaka tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan data valid yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan Analisis data dalam jenis metode penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dilaksanakan dan juga setelah pengumpulan data dilaksanakan. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga tuntas. Berdasarkan

model Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga aktifitas, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017, p. 246).

KERANGKA PEMIKIRAN

Dari sekian banyak faktor/aktor yang terlibat di dalam konflik Timur Tengah, dua negara terbesar dan terkuat di kawasan Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran, seringkali muncul dan terlibat dalam berbagai ketegangan yang ada. Konfrontasi, aksi saling tuduh, dan rivalitas keduanya seringkali ditunjukkan sebagai bentuk perselisihan kedua negara. Aksi saling tuduh dan sebagainya tersebut dapat menjelaskan bahwa hubungan antara Arab Saudi dan Iran tidaklah baik-baik saja.

Sebagaimana yang telah dijelaskannya sebelumnya, dengan mengamati sikap dan perilaku Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah, maka dapat dipahami pula bagaimana hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang bukan hanya berdasar dari fakta-fakta material saja, namun merupakan sesuatu yang lebih kompleks dari pada hal tersebut. Untuk mengurai akar penyebab dari rivalitas dan ketegangan kedua negara yang disebabkan oleh faktor ideologi, penulis menggunakan pendekatan konstruktivisme sebagai pisau analisis.

TEORI KONSTRUKTIVISME

Menurut konstruktivisme, realitas sosial tidak dapat dijelaskan hanya dengan entitas fisik atau objek material yang berada diluar kesadaran manusia, namun merupakan ide dan keyakinan (Jackson & Sorensen, 2013, p. 373). Konstruktivisme menekankan pada efek pembentuk dari ide-ide dan norma-norma serta menjelaskan bagaimana ide-ide dan diskursus-diskursus tersebut mempengaruhi persepsi dan prioritas suatu negara dalam kebijakan luar negerinya (Nia & Seifi, 2015, p. 94). Dalam memandang hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran, kebijakan luar negeri kedua negara sangatlah menentukan bagaimana perilaku yang akan diberikan kepada satu sama lain. Dalam hal kebijakan luar negeri, konstruktivis menganggap bahwa kebijakan luar negeri memang didasarkan pada kepentingan nasional suatu negara, namun kepentingan nasional dibentuk tidak hanya oleh faktor-faktor fisik seperti ancaman, namun juga oleh identitas, norma, dan faktor sosio-kultural lainnya.

Konstruktivisme merupakan sebuah pemikiran yang terlahir karena didasari oleh ketidakpuasan atas peranan arus-arus utama pasca Perang Dunia II. Konstruktivisme hadir dalam bentuk transformasi perspektif baru yang ditemukan oleh para ilmuwan HI sekitar tahun 1980-an sebagai alat analisis dalam studi HI. Teori arus utama seperti Realisme dan Liberalisme dianggap terlalu mengusung *power* sebagai dasar analisis dan mengesampingkan faktor-faktor non-material. Tokoh yang menyumbangkan pemikirannya dalam teori konstruktivisme diantaranya adalah Alexander Wendt, Friedrich Kratochwill, dan Nicholas Onuf.

Bagi pendekatan konstruktivisme, fakta-fakta material bukanlah dianggap sebagai sesuatu yang paling esensial dalam memahami perilaku sebuah negara. Menurut konstruktivisme, realitas sosial tidak dapat dijelaskan hanya dengan entitas fisik atau objek material yang berada diluar kesadaran manusia, namun merupakan ide dan

keyakinan (Jackson & Sorensen, 2013, p. 373). Konstruktivisme menekankan pada efek pembentuk dari ide-ide dan norma-norma serta menjelaskan bagaimana ide-ide dan diskursus-diskursus tersebut mempengaruhi persepsi dan prioritas suatu negara dalam kebijakan luar negerinya (Nia & Seifi, 2015, p. 94).

Dalam hal kebijakan luar negeri, konstruktivis menganggap bahwa kebijakan luar negeri memang didasarkan pada kepentingan nasional suatu negara, namun kepentingan nasional dibentuk tidak hanya oleh faktor-faktor fisik seperti ancaman, namun juga oleh identitas, norma, dan faktor sosio-kultural lainnya. Hal serupa dikemukakan oleh Wendt yang menekankan bahwa faktor-faktor berupa ide dan pemikiran mempengaruhi persepsi pengambil kebijakan melihat struktur internasional (Dharmaputra, 2012, pp. 19–20).

Sebagaimana negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya, Arab Saudi dan Iran menetapkan nilai-nilai Islam sebagai dasar sistem politik negaranya. Dasar-dasar tersebut kemudian yang mempengaruhi seluruh aspek-aspek bernegara kedua negara tersebut. Poin perbedaannya adalah mengenai prinsip dasar interpretasi keduanya dalam menyerap nilai-nilai Islam, yang kemudian menjadi dua bentuk ideologi yang berbeda. Arab Saudi dengan Sunni, dan Iran dengan Syi'ah. Perbedaan ideologi yang telah mengakar dalam diri kedua negara menjadi faktor yang signifikan dalam perselisihan yang terjadi antara keduanya.

Sunni dan Syiah dapat dikategorikan sebagai sebuah ideologi karena telah mencakup pengertian yang telah disebutkan diatas. Ideologi merupakan serangkaian ide/kepercayaan/nilai dasar yang dipegang oleh suatu kelompok yang dapat mempengaruhi perilakunya. Sunni dan Syiah memiliki nilai-nilai dasar keislaman yang terbentuk dari sejarah masa lalu yang kemudian membentuk suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana ideologi komunisme di China dan Rusia, ideologi Sunni di Arab Saudi dan Syiah di Iran masuk sebagai konstitusi yang merupakan pedoman utama legitimasi politik dan menjadi dasar kedua negara dalam menentukan kebijakan negaranya baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dsb. Contohnya, Sunni dan Syi'ah memiliki hukum sendiri yaitu hukum Syari'ah yang bersumber pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits.

Pasca revolusi Islam di Iran, ideologi Syi'ah masuk dalam struktur ideasional utama yang membentuk negara Iran. Iran merupakan negara yang memiliki populasi penganut Syi'ah terbesar di dunia dan menjadi satu-satunya negara yang menjadikan ideologi Syi'ah sebagai dasar negaranya. Nilai-nilai dan tradisi Syi'ah dipandang sebagai sesuatu yang cocok dengan apa yang Iran inginkan dan sesuai dengan karakteristik utama Syi'ah yaitu keshalihan, menegakkan keadilan, dan dukungan terhadap yang tertindas/tertekan diseluruh dunia (Nia & Seifi, 2015, p. 105). Iran juga memiliki ambisi untuk menyebarkan ide-ide revolusi kepada negara-negara lainnya di Timur Tengah.

Ideologi yang didasari dari dogma ini yang menjadi ideologi politik, mempengaruhi tata kelola dan struktur pemerintahan, menambah perbedaan ideologi antara dua kekuatan negara tersebut. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana masing-masing pemerintahan memberikan Penulis dalam hal ini menemukan bahwa perbedaan ideologi antara Sunni dan Syi'ah inilah yang menjadi penyebab retaknya hubungan kedua negara. Pada pembahasan, penulis akan menjelaskan apa saja bentuk kebijakan

kedua negara yang didasari oleh ideologi yang mereka anut tersebut yang menyebabkan ketegangan ataupun perselisihan yang terjadi antara kedua negara.

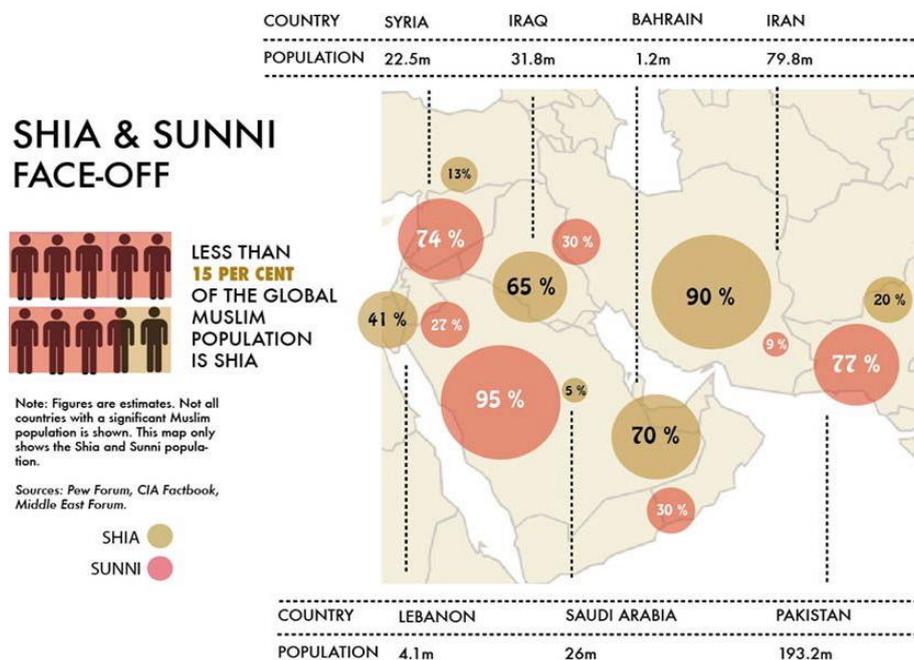
Hingga saat ini, Arab Saudi menyebut dirinya sebagai pemimpin dari dunia Islam, karena dua tempat paling suci bagi agama Islam yaitu Mekkah dan Madinah terdapat di Arab Saudi dan menjadi jantung kota Islam (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, n.d.). Kemunculan Iran sebagai negara dalam bentuk Republik Islam pasca Revolusi tahun 1979 dilihat sebagai ancaman oleh Arab Saudi. Hal ini diperkuat dengan ambisi Iran untuk menyebarkan ide revolusinya ke negara-negara lainnya di Timur Tengah. Hal tersebut membuat Arab Saudi khawatir bahwa Iran akan muncul sebagai pesaingnya. Arab Saudi adalah negara yang sudah sejak awal memfatwakan Syi'ah sebagai aliran yang sesat (Sahide, 2013b, p. 322). Arab Saudi melakukan berbagai usaha untuk membendung pengaruh Iran dan Syi'ah di kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

IDEOLOGI SUNNI-SYI'AH: SEJARAH, PERBEDAAN, DAN PERTENTANGAN

Dari sekian banyak konflik yang ada di Timur Tengah, sentimen tentang Sunni-Syi'ah seringkali muncul. Ideologi Sunni dan Syi'ah ini tersebar di berbagai negara di Timur Tengah. Dalam persentase angka, sekitar 15% umat Islam menganut ideologi Syi'ah, dan 85% lainnya menganut ideologi Sunni. Arab Saudi merupakan populasi terbesar Sunni dan Iran merupakan populasi terbesar Syi'ah. Peta jumlah Sunni dan Syi'ah di Timur Tengah adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Sunni dan Syi'ah di Timur Tengah



Sumber: (CIA Factbook, n.d.)

Selain Iran, negara yang memiliki penduduk dengan jumlah penganut Syi'ah yang besar di Timur Tengah berdasarkan data di atas adalah Bahrain (70%), Iraq (65%), dan Lebanon (45%). Hubungan antara Arab Saudi dengan tiga negara tersebut berjalan dengan normal, berbeda dengan hubungan Arab Saudi dengan Iran. Hal tersebut

disebabkan karena negara-negara tersebut tidak menjadikan Ideologi Syi'ah sebagai ideologi resmi negaranya, dan pemimpin pemerintahan dari ketiga negara tersebut tidak menganut ideologi Syi'ah.

a. Sejarah

Apabila ditarik mundur, sejarah Sunni dan Syi'ah lahir pasca wafatnya Nabi Muhammad ﷺ tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi siapa yang akan menggantikannya sebagai Khalifah. Kelompok Sunni berpendapat bahwa Abu Bakar yang berhak menjadi penerus Nabi Muhammad ﷺ. Di sisi lain, kelompok Syi'ah yang kita kenal saat ini sebenarnya bernama *Syi'atu 'ali*, atau pengikut Ali bin Abi Thalib. Lama-kelamaan, penyebutan tersebut hanya sampai Syi'ah saja. Mereka mengklaim bahwa Ali adalah penerus sah untuk Nabi Muhammad ﷺ sebagai pemimpin (imam) dari umat Islam setelah wafatnya pada 632 M (BBC, 2016). Dari peristiwa tersebut, Sunni dan Syi'ah kemudian berkembang hingga menjadi dua ideologi yang berbeda hingga saat ini.

b. Perbedaan dan Pertentangan

Secara umum, jurang pemisah antara Sunni dan Syi'ah hingga saat ini adalah mengenai persoalan Imamah. Imamah dalam bahasa Arab berarti kepemimpinan. Kepemimpinan yang dimaksud ini adalah adanya 12 Imam yang dimulai Imamah pertama yang dipegang oleh Ali. Syi'ah dan Sunni sepakat bahwa seorang nabi merupakan seorang pemimpin yang *ma'sum* (terbebas dari dosa), dan hanya beliaulah yang ditetapkan ke-*ma'sum*-annya. Meskipun demikian, Syi'ah juga menerapkan hal serupa kepada imam mereka sehingga memiliki derajat seperti nabi yang *ma'sum*.

Bagi Sunni, ketaatan kepada pemimpin yang selaras dengan al-Qur'an dan Sunnah merupakan tolak ukur terhadap kepemimpinannya, bukan malah disandarkan kepada ke-*ma'sum*-annya karena setiap individu pasti melakukan kesalahan. Sunni dan Syi'ah juga memiliki perbedaan dalam rukun Islam dan Rukun Iman, poin perbedaan tersebut lagi-lagi berkaitan dengan imamah. Perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dalam rukun Islam hanya satu, yaitu apabila di dalam Sunni terhadap *syahadat*, maka di dalam Syi'ah ada pula yang dinamakan *wilayah*. *Wilayah* adalah pengakuan atas otoritas setelah Rasulullah ﷺ dan meneladani *ahlulbait* dalam beragama (Sahidin, 2015, p. 45). Rukun Wilayah ini berkaitan dengan Imamah.

Dari segi Sumber hukum Islam, Sunni dan Syiah sama-sama berpendapat bahwa sumber hukum utama adalah Al-Qur'an, Sunnah atau Hadits, Qiyas, Ijma' dan Ijtihad. Sumber-sumber tersebutlah yang kemudian dibentuk menjadi hukum Syari'ah. Akan tetapi, Hadits Syi'ah berbeda dengan Hadits Sunni (Blanchard, 2009, p. 2). Perbedaannya adalah karena Syi'ah memasukkan perkataan para Imam yang mereka sebagai hadits. Penafsiran resmi Syi'ah juga lebih memberikan banyak ruang untuk memasukkan akal pemikiran manusia didalamnya, sedangkan penafsiran yang dilakukan oleh Sunni yang sangat berhati-hati dalam memasukkan akal pemikiran manusia ke dalam sebuah penafsiran agama.

Bagi Syi'ah, para imam juga merupakan ahli tafsir yang penafsirannya dapat diambil sebagai hukum. Ilmu agama dalam agama Syi'ah tidak serta merta dapat

dimiliki oleh seluruh umat Islam. Syi'ah meyakini bahwa kelebihan para imam adalah adanya ilmu yang hanya diturunkan kepada keturunan Rasulullah ﷺ dari jalur Ali. Adapun bagi Sunni, ilmu atau agama adalah sesuatu yang otentik, telah sempurna serta tidak ada yang disembunyikan untuk sebagian orang saja. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ..." (Al-Maa-idah:3) (Jawas, n.d.).

Pengaruh Struktur Ideasional Sunni-Syi'ah dalam Sistem Politik Arab Saudi-Iran

Sejak tahun 1979, identitas menjadi faktor penting yang mempengaruhi pandangan Arab Saudi dan Iran terhadap satu sama lain. Elemen terpenting dari identitas kedua negara adalah agama. Agama merupakan sumber legitimasi dari Kerajaan Saudi Arabia dan rezim Ayatullah di Iran (Huwaidin, 2015, p. 71). Kedua negara merupakan negara yang sama-sama menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik bernegara mereka. Sebagai negara yang wilayahnya merupakan saksi bisu perjalanan sejarah Islam, kedua negara hingga saat ini sama-sama ingin menyebarkan pengaruhnya dalam lingkup kawasan, bahkan dunia.

Pada era pra-1979, hubungan diplomatik Iran-Arab Saudi ditandai sebagai periode ketika kedua kekuatan regional saling mendukung dalam hubungan yang kooperatif dan bersahabat (Hagood, 2010). Setelah pemerintah kolonial Inggris pergi dari kawasan kedua negara ini pada 1971, hubungan antara Iran-Arab Saudi mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Kedua negara ini memainkan peran yang sangat penting pada kawasan Timur Tengah dengan kebijakan masing-masing negara yang terksesan pro dengan pemerintah Barat, khususnya Amerika Serikat (Grumet, 2015).

Pemimpin Iran pada masa tersebut terlihat sepenuhnya setuju dengan persyaratan dari perjanjian dan ketentuan yang disepakati dengan Saudi dalam mengatur keterlibatan regional yang dimana hal ini sangat menguntungkan pemerintah Barat (AS dan Inggris) pada kawasan Timur Tengah. Namun gejolak domestik di Iran yang dibawa oleh kelompok Khomeini yang tidak setuju dengan Shah Reza Pahlavi yang merupakan Raja Iran dalam menjaga hubungan dengan Arab Saudi semakin membesar. Dimana pada tahun 1977-1979 pemberontakan mulai terjadi dan semakin berkembang dibawah kelompok Khomeini yang sangat tidak menyukai kebijakan Pahlavi yang pro dengan Barat. Revolusi ini berakhir pada tahun 1979 dengan tumbangnya rezim Iran dan digantikan dengan pemerintahan Ayatollah Ruhollah Khomeini yang merupakan pemimpin Iran yang anti terhadap negara barat dan pemerintah Saudi (Gözl, 2017).

a. Iran

Agama resmi di Republik Islam Iran pasca revolusi adalah Islam dan *itsna 'asyharyah* atau Syi'ah Dua Belas Imam. Ketentuan ini berlaku selamanya dan bersifat mutlak, tidak dapat digantikan. Dalam Konstitusi Republik Islam Iran pasal 12 disebutkan bahwa : *"The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari school, and this principle will remain eternally immutable."* (Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran, n.d.) Syiah Dua Belas Imam adalah bentuk Syi'ah yang paling banyak diikuti saat ini. Syi'ah Dua Belas Imam ini mengakui adanya 12 imam yang merupakan keturunan dari Ali dan meyakini bahwasanya mereka telah

dipilih sejak lahir. Dalam keyakinan Syi'ah, harus terdapat satu orang yang mengisi kepemimpinan Islam. Khomeini berpendapat bahwa pemerintahan Islam hanya dapat dipimpin oleh seorang fakih. Fakih adalah orang yang mengetahui fungsi pengambilan keputusan hukum. Konsep ini kemudian dijadikan sebagai sistem pemerintahan di Iran. Negara Iran memiliki seorang presiden sebagai pemimpin negara yang mengatur semua urusan kenegaraan. Di sisi lain, Iran juga memiliki seorang pemimpin spiritual atau Imam yang memiliki posisi di atas presiden yang memiliki wewenang yang pendapatnya harus didengar dalam setiap keputusan yang diambil oleh negara.

Adapun struktur ideasional yang membentuk identitas bagi Iran diantaranya adalah anti-hegemoni dan Politik Islam Syi'ah. Beragam tekanan dan dominasi dari para imperialis yang terus dialami masyarakat Iran di masa lalu dan juga dari pemerintahannya sendiri yang pro-Barat hingga awal tahun 1979 membuat Iran pasca revolusi berusaha untuk membentuk sebuah tatanan baru di kawasan berdasarkan kebijakan anti-hegemoni. Sejak 1979, Iran mengubah haluan politik luar negerinya dari yang sebelumnya sangat dekat dengan Barat menjadi memusuhi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Islam Iran melakukan interaksi dengan dunia internasional berdasarkan identitasnya sebagai negara anti-hegemoni, baru kemudian identitas inilah yang menentukan siapa 'kawan' dan siapa 'lawan' (Nia, 2010, p. 169). Dengan ini dapat dilihat bahwa ide dan norma mempengaruhi identitas dan perilaku negara Iran.

Dalam Politik Islam ala Iran, Pandangan politik Iran pasca revolusi banyak didominasi oleh prinsip-prinsip agama, terutama dari pandangan pemimpin spiritual Iran yang memegang peran penting dalam memutuskan kebijakan dan sikap yang diambil oleh Iran. Sebagai contoh, Ayatollah Khomeini menentang sistem bipolar yang ada dalam hubungan internasional, "Kami tidak sejalan dengan kekuatan manapun. Kami tidak akan berada di bawah dominasi dari Amerika dan Uni Soviet" (Nia, 2010, p. 159). Iran terus berusaha untuk menyingkirkan pengaruh negara lain di Iran, terutama negara-negara non-Muslim. Keyakinan ini didasari oleh Surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi: "... Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman" (Kalam: Sindo News, n.d.). Hal ini membuktikan bahwa ideologi Syi'ah yang dituangkan dalam Wilayah Al-Fakih memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap arah kebijakan luar negeri Iran.

b. Arab Saudi

Pada awal abad ke-18, Semenanjung Arab penuh dengan kekacauan, ketidakstabilan politik dan lemahnya keimanan terhadap agama yang disebabkan oleh tersebarnya paham-paham baru dalam agama (yang menyimpang). Negara Saudi pertama didirikan pada 1744 di Al-Dir'iyah, ibu kotanya, oleh Imam Muhammad bin Saudi ketika ia bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Bersama-sama mereka membentuk aliansi dan sepakat untuk mereformasi dan membersihkan keyakinan Islam dari segala distorsi berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad ﷺ, Nabi Allah (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, n.d.). Muhammad bin Abdul Wahhab merupakan seorang *Mujaddid* yang berjuang untuk menjaga kemurnian agama Islam dari segala kesyirikan dan penyimpangan. Muhammad tidak membawa sebuah ajaran baru dalam Islam, melainkan hanya meluruskan apa yang sudah tertulis di Al Qur'an dan Sunnah.

Diantaranya adalah menolak bid'ah dan syirik, serta memberantas segala bentuk praktik yang menyimpang dari Islam seperti: menyembah orang-orang suci, meminta perlindungan kepada selain Allah, menyembah kuburan, miras, rokok, dan music (The Oxford Dictionary of Islam, n.d.).

Pada tanggal 19 September 1932, dekrit kerajaan resmi dikeluarkan yang mengumumkan tentang persatuan negara dengan nama "Kerajaan Saudi Arabia". Penyatuan ini mencakup sebagian besar wilayah di Semenanjung Arab. Dengan pengumuman ini, Raja Abdul Aziz menunjukkan usahanya untuk menyatukan negara dan mendirikan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Di bawah pemerintahan Raja Abdul Aziz, Kerajaan Arab Saudi mulai mengikuti banyak organisasi internasional dan konvensi yang memiliki tujuan keamanan, stabilitas, dan keadilan. Arab Saudi adalah negara Islam yang dijalankan dengan sistem monarki. Raja adalah pemimpin negara dan pemerintahan. Tidak ada pemisahan antara negara dan agama. Berdasarkan konstitusi tahun 1992, Sunni Islam adalah agama resmi di Arab Saudi konstitusi negara adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pasal 1 dalam konstitusi Arab Saudi dinyatakan bahwa:

"The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are its constitution, Arabic is its language and Riyadh is its capital." (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, n.d.)

Hukum yang digunakan di Arab Saudi adalah Hukum Syariah. Hukum Syariah adalah hukum yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta fatwa dari para ulama kontemporer. Fatwa adalah hukum yang dikeluarkan oleh para ulama senior tentang suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi. Sumber fatwa harus berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi ﷺ, sebagaimana dijelaskan pada pasal 45 yang berbunyi:

"The source of the deliverance of fatwa in the Kingdom of Saudi Arabia is God's Book and the Sunnah of His Messenger. The law will define the composition of the senior ulema body, the administration of scientific research, deliverance of fatwa and it's (the body of senior ulema's) functions." (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia, n.d.)

Seluruh aspek politik di Arab Saudi harus tunduk pada Al-Qur'an dan Sunnah seperti pemerintahan, legislatif dan yudikatif. Seluruh pengadilan telah dimandatkan untuk menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai basis dari peradilan tanpa dibatasi oleh mazhab tertentu (Federal Research Division, 2006, p. 21). Sistem pengadilan atau hukum di Arab Saudi dijalankan berdasarkan hukum syariah dijelaskan pada artikel 48 dalam konstitusi. Kebijakan luar negeri Arab Saudi dipengaruhi oleh berbagai sumber ideasional yang sangat penting dipahami dalam melihat hubungan Arab Saudi dengan negara lain.

Poin paling penting yang menjelaskan hal ini adalah Arabisme dan Islam. Kedua faktor ini memegang peranan signifikan bagi Arab Saudi dalam menentukan arah kebijakannya. Seperti yang dijelaskan oleh Alexander Wendt dalam teori Konstruktivisme, bahwa identitas, norma, dan faktor sosio-kultural sangat mempengaruhi pengambilan sebuah keputusan dalam kebijakan suatu negara, begitu juga dalam kebijakan luar negeri. Agama Islam di Arab Saudi merupakan sebuah instrumen yang mempersatukan dan membentuk komponen identitas

nasional negara ini. Komitmen Arab Saudi dalam agama Islam adalah untuk menjaga kemurnian Islam dan tauhid. Hal ini yang mendorong pemerintah Saudi untuk mendorong penentangan terhadap segala bentuk penyimpangan pemahaman, ideologi, keimanan, yang khususnya berasal dari pemahaman Syiah Iran.

Pertentangan ideologi yang mempengaruhi hubungan antara Arab Saudi dan Iran disebabkan juga oleh pandangan Iran yang memiliki prinsip anti-hegemonisme yang mereka temukan dari pengalaman masa lalu. Semenjak revolusi Islam, Iran berusaha untuk mendirikan sebuah tatanan baru di kawasan Timur Tengah berdasarkan kebijakan anti-hegemoni (Nia & Seifi, 2015, p. 105). Iran berambisi untuk menyebarkan hal ini sehingga memberikan efek pada negara sekitarnya, Timur Tengah, bahkan dunia. Iran dalam kebijakan luar negerinya mengusung *counter-hegemony* yang kuat dan mencoba untuk menghilangkan semua bentuk kolonialisme, despotisme, absolutisme dan imperialisme. Hal ini merupakan fakta bahwa kebijakan anti-Barat dan anti-Amerika oleh Iran dapat dipahami dalam konteks tujuan dan motivasi Iran.

Amerika adalah salah satu negara hegemoni yang 'dimusuhi' oleh Iran. Keberadaan militer Amerika di kawasan sangat membuat Iran merasa terancam. Selain itu, kedekatan Arab Saudi dan Amerika membuat Iran geram dan menuduh bahwa Arab Saudi adalah 'boneka' Barat. Sedangkan bagi Arab Saudi, kedekatannya dengan Amerika adalah untuk menjaga keamanan negaranya. Kebijakan Pro-Amerika oleh Arab Saudi dan negara Teluk lainnya juga menjadi salah satu faktor yang memicu hubungan tidak baik antara Arab Saudi dan Iran. Contoh lainnya adalah ketika konflik Arab Saudi dan Iran yang berdampak pada diboikotnya jamaa'ah haji dari Iran, penganut Syi'ah kemudian berbondong-bondong datang ke Karbala. Adel Al-Musawi, seorang pejabat kuil di Karbala menyatakan: "Konflik Arab-Iran telah memaksa warga (Syi'ah) Iran untuk datang ke Karbala untuk mengunjungi tempat suci Imam Hussein," kata al-Mussawi, menambahkan, "bagi Syiah, ini bernilai 70 kali haji." (VOA Islam, 2016)

Berbeda dengan Iran yang mengalami ketertindasan, penjajahan, dan tekanan di masa lalu, Arab Saudi sejak dulu tidak pernah dijajah oleh para imperialis. Arab Saudi selalu menjadi negara yang berada dalam posisi penting dan strategis serta menjadi pemimpin bagi Islam maupun Arab. Rasa kepemilikan yang tinggi dengan identitas Arab merupakan salah satu elemen penting bagi Arab Saudi di masa kontemporer. Identitas Arab yang didefinisikan sebagai kesamaan bahasa ini sangat erat kaitannya dengan Islam. Berbagai keutamaan yang diturunkan kepada bangsa Arab antara lain: Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nabi berasal dari bangsa Arab, dan dua tempat suci umat Islam berada di Arab Saudi.

Dengan pengalaman sejarah tersebut, Arab Saudi ingin terus mempertahankan posisi, status dan pengaruhnya di Arab dan Islam. Hal ini yang menyebabkan Arab Saudi menjadikan keamanan nasional dan stabilitas di kawasan merupakan hal yang krusial karena menyangkut kepentingan nasionalnya. Tanah Arab, sejak diutusnya Nabi Muhammad ﷺ menjadi pusat dari peradaban Islam. Sejak meninggalnya, kekhalifahan dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian dibentuk sistem politik yang berisi hukum-hukum dan aturan-aturan (Majin, 2017, p. 69). Nabi Muhammad ﷺ ingin menyebarkan pesan Tuhan yaitu agama Islam ini tidak hanya di

Arab saja namun juga kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, para sahabat dan pengikut Rasulullah kemudian menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia baik dengan pena maupun pedang. Arab Saudi mempertimbangkan kebijakan luar negerinya berdasarkan geografis, historis, religius, ekonomi, keamanan, *political everlasting principles*, dan fakta-fakta. Dan salah satu faktor yang paling penting adalah memperkuat relasi dengan Negara-negara Teluk dan Negara-negara di Semenanjung Arab dan memperkuat relasi dengan Negara-negara Arab dan Islam (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, 2016).

Oleh sebab itu, Arab Saudi memandang Iran sebagai ancaman karena ambisi Iran untuk menyebarkan ide revolusi dan ideologi Syi'ah mereka kibarkan kembali pasca revolusi merupakan hal yang sangat berbahaya bagi kemurnian agama Islam yang sesungguhnya. Dengan sejarah Islam yang mengalir di tanah Arab, maka Arab Saudi mengemban tugas mulia yaitu untuk menjaga dan merawat tempat suci bagi agama Islam dan juga menjaga keutuhan agama Islam yang benar.

Dinamika Hubungan Bilateral Arab Saudi dan Iran di Timur Tengah

Hubungan bilateral antar kedua negara dapat dikatakan bersifat fluktuatif. Semenjak keduanya resmi menjadi sebuah negara, hubungan bilateral Arab Saudi dan Iran mengalami pasang surut. Pasalnya, kondisi Timur Tengah di masa-masa awalnya masih belum stabil. Beberapa negara seperti Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Aden/Yaman pada saat itu merupakan negara protektorat Inggris. Ketegangan di antara kedua negara pada masa ini umumnya terjadi karena perebutan wilayah dan kekuasaan terutama di bagian teluk. Dinamika hubungan antara Arab Saudi dan Iran dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek Diplomatik

Hubungan diplomatik kedua-nya ditandai dengan didirikannya kedutaan di masing-masing negara. Pada tahun 1930, Kedutaan Iran untuk Arab Saudi didirikan di Riyadh sedangkan yang di Jeddah pada tahun 1975. Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Iran berada di Khasanak, Tehran. Sedangkan Konsulat Arab Saudi untuk Iran berada di Sajjad Shahr, Mashhad (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia, 2016). Dalam perkembangannya, hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran pernah terputus. Pada pelaksanaan haji tahun 1981, terjadi bentrokan di Makkah ketika jama'ah haji asal Iran melakukan demonstrasi anti-Amerika dan anti-Israel, dan meneriakkan slogan-slogan pro-Khomeini (Okruhlik, 2003, p. 114). Kejadian yang sama terulang kembali pada 1987. Hubungan Arab Saudi dan Iran kembali memanas pasca bentrokan tersebut. Akhirnya pada 1988, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Tehran, dan Iran secara formal memboikot haji (Okruhlik, 2003, p. 115).

Hubungan kedua negara kemudian sempat tersambung pada masa kepemimpinan Presiden Khatami yang reformis di Iran. Akan tetapi, hubungan konfliktual antara kedua negara belum bisa dikatakan membaik. Ketegangan kedua negara masih ditunjukkan melalui berbagai peristiwa yang ada di kawasan, salah satunya adalah eksekusi mati ulama Syi'ah Nimr al-Nimr yang berujung pada putusnya kembali hubungan diplomatik kedua negara pada awal 2016, hingga saat ini.

b. Aspek Ekonomi

Minyak merupakan salah satu 'pelumas' antara hubungan Arab Saudi dan Iran. Jumlah cadangan sumber daya minyak bumi kedua negara termasuk dalam 5 besar peringkat dunia (Dilliinger, 2018). Hubungan kedua negara dalam bidang ini terjalin karena sama-sama mengeksport minyak, Arab Saudi dan Iran sama-sama menjadi negara pendiri OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*) pada tahun 1960. Pada aspek ekonomi, hubungan Arab Saudi dan Iran terjalin dengan adanya perjanjian-perjanjian kerja-sama antara kedua negara dan juga melalui organisasi seperti OPEC. Hubungan yang terjalin bersifat fluktuatif, bergantung pada kondisi dan kebijakan kedua negara pada saat itu.

Hubungan kedua negara dalam OPEC seringkali mengalami ketegangan. Misalnya, pada pertemuan OPEC tahun 2000, Arab Saudi menjanjikan Washington untuk menstabilkan harga minyak, hal ini menimbulkan kritik dari Iran karena Arab Saudi tunduk pada keinginan Amerika Serikat untuk menurunkan harga (Okruhlik, 2003, p. 118).

c. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Pasca terjadinya Revolusi Iran, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perselisihan yang terjadi antara Arab Saudi dan Iran. Kedua negara tidak pernah melakukan perang terbuka dengan satu sama lain. Ketegangan dan perselisihan yang ada ditunjukkan dengan keterlibatan dan kebijakan kedua negara terhadap konflik-konflik di Timur Tengah. Dalam aksinya, bentuk-bentuk ketegangan Arab Saudi dan Iran dalam perang proksi di Timur Tengah antara lain:

1. Iraq

Semenjak revolusi Iran 1979, Iraq memegang peranan kunci terhadap persaingan Arab Saudi dan Iran. Bagi Iran, Iraq merupakan negara yang sangat penting karena di Iraq terdapat tempat suci Askari serta terdapat Najaf dan Karbala, dua kota suci Islam yang merepresentasikan jantung sejarah Syi'ah bagi Republik Islam (Khan, 2014). Iraq merupakan negara dengan mayoritas Syiah, yaitu sebesar 65%. Sedangkan Sunni mencakup 30% dari total populasi (CIA Factbook, n.d.). Sejak 1979-2003, Iraq dipimpin oleh Saddam Hussein yang Sunni. Pada tahun 1980, Iran dan Iraq terlibat perang 8 tahun. Arab Saudi menyatakan dukungan terhadap rezim Saddam Hussein dengan memberikan sumbangan dana sebesar 25 milyar US dollar dan mendesak negara-negara teluk untuk menyumbang dana perang untuk Iraq.

Pada tahun 2003, Amerika Serikat melakukan invasi di Iraq. Peristiwa ini berujung pada lengsernya Saddam Hussein sebagai pemimpin negara. Hal tersebut mengakibatkan runtuhnya salah satu negara dengan kepemimpinan Sunni terbesar di kawasan dan menjadikan mayoritas Syi'ah mendominasi parlemen dan membentuk perdana menteri sendiri, sehingga membentuk Iraq sebagai negara Arab yang beraliran Syi'ah pertama (Grumet, 2015, p. 83).

2. Bahrain

Semenjak Inggris menarik pasukannya pada 1971, Bahrain telah menjadi negara monarki konstitusional yang independen. Di masa lalu, Bahrain merupakan negara yang menjadi 'rebutan' antara Arab Saudi dan Iran. Dari segi sejarah dan agama, Iran tidak diragukan lagi memiliki pengaruh Syiah yang kuat di Bahrain (Czornik, 2017, p. 187). Bahrain sendiri merupakan negara mayoritas Syi'ah yang dipimpin oleh rezim Sunni di bawah kepemimpinan rezim Al-Khalifa.

Kelompok Syiah sering melakukan protes dan demonstrasi kepada pemerintah Sunni di Bahrain. Gelombang protes kelompok Syi'ah di Bahrain ini tidak lepas dari dukungan Tehran. Beberapa demonstran dari kalangan pemuda mengklaim bahwa mereka adalah gerakan Hizbullah yang merupakan gerakan politik Islam Syi'ah. Mereka percaya bahwa pemimpin spiritual mereka adalah Khomeini (Grumet, 2015, p. 123). Kewalahan dalam menghadapi demonstran, pada Maret 2011, pemerintah Bahrain meminta bantuan kepada negara-negara GCC. Arab Saudi langsung menyambut dengan positif dan mengirimkan 1.200 tentaranya beserta 20 tank ke Bahrain. Pengiriman bantuan militer ini menimbulkan reaksi dari otoritas Iran. Iran memprotes intervensi yang dilakukan Arab Saudi terhadap urusan internal negara yang berdaulat.

3. Yaman

Pada tahun 2004, konflik bersenjata melanda provinsi utara Yaman. Pemberontakan terhadap pemerintah Yaman ini dimotori oleh kelompok minoritas Houthi. Houthi merupakan gerakan keluaran dari kelompok yang bernama *Believing Youth*, gerakan moderat teologis yang ditemukan pada tahun 1992 (Al Batati, 2014). Houthi mewakili cabang Syi'ah Zaidiyah yang bertempat di utara Yaman, dekat dengan perbatasan Arab Saudi. Kelompok Zaidiyah merupakan minoritas dibandingkan dengan Sunni di Yaman, namun merupakan mayoritas di bagian utara Yaman (Nia & Seifi, 2015, p. 108). Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh tekanan sosio-ekonomi dan politik yang dirasakan oleh kelompok Houthi dari pemerintah. Sejak tahun 2003, kelompok ini aktif menyuarakan slogan anti-Barat dan bahkan anti-Pemerintah (Al Batati, 2014). Pada 2009, keadaan di provinsi utara Yaman semakin parah. Arab Saudi dengan izin dari pemerintah Sana'a melakukan intervensi militer untuk membantu pemerintah Yaman untuk melawan pemberontak Houthi yang mengancam negara Yaman. Menurut Iran, tuduhan Saudi terhadap Iran ini hanya motif untuk menjadikan Iran sebagai kambing hitam untuk membenarkan apa yang Arab Saudi lakukan terhadap Yaman.

4. Suriah

Proxy War telah mulai terbentuk di Suriah antara Arab Saudi dan Iran pasca memuncaknya protes terhadap pemimpin Suriah, Bashar Al-Asad. Suriah adalah negara dengan mayoritas penduduknya Sunni, yaitu 74% (Central Intelligence Agency (CIA), n.d.). Negara ini dipimpin oleh Presiden Bashar Al-Asad yang berasal dari kelompok Syi'ah Alawi yang minoritas (Sahide, 2013b, p. 320). Pemerintahan Suriah didominasi oleh kelompok Alawi yang memegang jabatan-jabatan penting di seperti militer, keuangan, dan partai politik.

Suriah dan Iran sudah menjadi aliansi sejak terbentuknya Republik Islam Iran. Kedua negara ini memiliki tujuan dan pandangan politik yang sama yaitu 'anti-Imperialis'. Dalam konflik yang mencuat pada 2011 ini, Iran dengan tegas mendukung kelompok pemerintah yang merupakan aliansinya. Arab Saudi memilih untuk berdiri bersama kelompok oposisi yang juga merupakan kelompok Sunni di Suriah yang tertindas. Keterlibatan Arab Saudi dan Iran dalam konflik ini adalah dukungan yang diberikan kepada pihak yang didukung. Pada 2011, Iran mulai menyediakan bantuan, pelatihan dan peralatan pengawasan kepada

pemerintah Suriah. Sedangkan Arab Saudi juga menggelontorkan dana untuk bantuan, senjata dan pelatihan militer untuk tentara oposisi.

Puncak dari konflik yang terjadi di antara Arab Saudi dan Iran terjadi pada tahun 2016 ketika Arab Saudi memutuskan untuk melakukan eksekusi mati terhadap ulama Syi'ah yang berdomisili di Arab Saudi, Nimr Baqr Al-Nimr. Eksekusi mati ini dilaksanakan pada 2 Januari 2016 setelah Nimr menjadi terdakwa aksi terorisme. Berbagai aksi protes kemudian timbul menyusul eksekusi tersebut, terutama dari penganut Syi'ah. Reaksi keras juga diberikan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang mengatakan "pembalasan Tuhan atas eksekusi mati ulama Nimr akan melanda keluarga Al-Saud yang memimpin Kerajaan Saudi" (Christiastuti, 2016).

Pada 3 Januari, massa turun ke jalan dan menyerang kedutaan Arab Saudi di Teheran serta Konsulat Arab Saudi di Masshad. Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al- Jubeir menyebut aksi massa tersebut sebagai tindakan agresi dan melanggar konvensi internasional (Muhamad, 2016, p. 5). Silang pendapat kemudian terjadi antara otoritas Arab Saudi dan Iran yang berujung pada putusnya hubungan diplomatik kedua negara dan ditariknya perwakilan dari masing-masing negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan faktor-faktor identitas yang membentuk politik Iran dan Arab Saudi, maka dapat dilihat bahwa perilaku kedua negara dan kebijakan luar negeri yang diambil baik terhadap hubungan bilateral satu sama lain, maupun bagaimana sikap keduanya terhadap politik di kawasan dan dunia, banyak disetir oleh faktor yang berasal dari sumber ideologi kedua negara. Kebijakan luar negeri yang diambil oleh Arab Saudi dan Iran dipengaruhi oleh sumber yang telah mengakar dalam diri kedua negara yang kemudian berpengaruh pada perpolitikan antar kedua negara, kawasan, dan dunia.

Hal ini yang kemudian mempengaruhi hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Iran dalam tensi diplomatiknya dan geopolitik kedua negara pada kawasan Timur Tengah. Rivalitas kedua negara yang ditunjukkan dengan penyebaran pengaruh, persaingan *power* dan *proxy war* yang terjadi di berbagai kawasan di Timur Tengah yang khususnya didorong oleh faktor ideologi Sunni dan Syi'ah. Kedua ideologi inilah yang membentuk nilai, norma dan ide dalam membentuk identitas kedua negara. Pertentangan dari kedua pemahaman negara ini yang mendasari perbedaan dalam memandang posisi masing-masing aktor dan menjadi akar perselisihan mereka.

REFERENSI

- Al-Ghamidi, A. B. S. (2009). Siapa Bilang Sunni-Syi'ah Tidak Bisa Bersatu. In T. P. DH (Trans.), *Darul Haq*.
- Al Batati, S. (2014, August). *Who Are the Houthis in Yemen?* Al Jazeera. <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/08/yemen-houthis-hadi-protests-201482132719818986.html%3E>
- BBC. (2016). *Sunnis and Shia: Islam's ancient schism*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-16047709>
- Blanchard, C. M. (2009, January 28). *Islam: Sunni and Shiites*. Federation of American

- Scientist: Congressional Research Service. <https://fas.org/irp/crs/RS21745.pdf>
- Central Intelligence Agency (CIA). (n.d.). *The World Factbook*.
- Christiastuti, N. (2016, January 5). *Riwayat Gejolak Arab Saudi dan Iran dalam 20 tahun terakhir*. Detik.Com. <http://news.detik.com/internasional/d-3110875/riwayat-gejolak-arab-saudi-dan-iran-dalam-20-tahun-terakhir/3>
- CIA Factbook. (n.d.). *Middle East Forum*. <https://www.cia.gov/library/publications%0A/the-world-factbook/fields/2122.html%0A>
- Czornik, K. (2017). Bahrain as the Area of Saudi-Iranian Rivalry in the Second Decade of the 21st Century. *Studia Polticae Universitatis Silesiensis*, 19, 207–221. https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/12968/1/Czornik_Bahrain_as_the_area_of_Saudi_-_Iranian.pdf
- Dharmaputra, R. (2012). *Identitas Nasional dalam Analisis Politik Luar Negeri*. CSGS Publisher.
- Dilliinger, J. (2018). *The world largest oil reserves by country*. World Atlas. <https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-oil-reserves-by-country.%0Ahtml%0A>
- Federal Research Division. (2006, September). *Country Profile: Saudi Arabia*. Library of Congress. https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/Saudi_Arabia.pdf
- Gözl Olmo (2017). Khomeini's Face is in the Moon: Limitations of Sacredness and the Origins of Sovereignty. In: 'Sakralität und Heldenentum', Felix Heinzer, Jörn Leonhard and Ralf von den Hoff (ed.), 229–244, Helden - Heroisierungen - Heroismen 6. Würzburg: Ergon
- Grumet, T. R. (2015). *New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry* [University of Denver]. <https://digitalcommons.du.edu/etd/1028/>
- Hameed, U. U. (2017). The Saudi-Iranian Rivalry: A Foreign Policy Analysis Approach. *Towson University Journal of International Affairs*, L(2), 16–34. <https://wp.towson.edu/iajournal/journal-issues/2010-2019/spring-2017-issue/the-saudi-iranian-rivalry-a-foreign-policy-analysis-approach/>
- Hagood, A. (2010). *Saudi Arabia and Iran: The Tale of Two Media*. American University, Cairo, Arab Media and Society, (10).
- Huwaidin, M. (2015). The Security Dilemma in Saudi-Iranian Relations. *Review of History and Political Science*, 3(2), 69–79. <https://doi.org/10.15640/rhps.v3n2a8>
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction To International Relations: Theories and Approaches* (D. Suryadipura (Trans.)). Pustaka Pelajar.
- Jawas, Y. bin A. Q. (n.d.). *Islam adalah Agama yang Sempurna*. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/2043-islam-adalah-agama-yang-sempurna.html>
- Kalam: Sindo News. (n.d.). QS. *An-Nisa (Wanita)*. <https://kalam.sindonews.com/surah/4/an-nisa/140>
- Khalili, E. (2014). Sects in Islam: Sunnis and Shias2. *International Academic Journal of Humanities*, 1(1), 41–47. <https://www.iaiest.com/abstract.php?id=4&archiveid=458>
- Khan, I. (2014, August 10). *Why is Iraq so Important to Iran?* Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/features/2014/08/10/why-is-iraq-so-important-to-iran/>
- Majin, S. K. (2017). Iranian and Saudi Cultural and Religious Identities: Constructivist Perspective. *Open Journal of Political Science*, 7(1), 65–81. <https://doi.org/10.4236/ojps.2017.71006>

- Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran. (n.d.). *Constitution*. <https://en.mfa.ir/portal/viewpage/3997>
- Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia. (n.d.). *History of the Kingdom*. <http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutKingDom/Pages/CountryDevelopment36143.aspx>
- Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia. (2016, August 5). *The Foreign Policy of The Kingdom of Saudi Arabia*. <http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/KingdomForeignPolicy/Pages/ForeignPolicy24605.aspx>
- Muhamad, S. V. (2016, January). *Krisis Hubungan Arab Saudi-Iran*. Info Singkat Hubungan Internasional. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/InfoSingkat-VIII-1-I-P3DI-Januari-2016-7.pdf
- Nia, M. M. (2010). Understanding Iran's Foreign Policy: An Application of Holistic Constructivism. *Alternatives: Turkish Journal of International Relation*, 9(1), 148–180. https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=makale-detay&Alan=sosyal&Id=AWWF3_TWHDbCZb_mQsbf
- Nia, M. M., & Seifi, A. (2015). The Ideational Nature of Iranian-Saudi Interactions. *Iranian Review of Foreign Affairs*, 5(4), 91–117. <http://irfajournal.csr.ir/WebUsers/irfajournal/UploadFiles/OK/13941107946585001697-F.pdf>
- Okruhlik, G. (2003). Saudi Arabian-Iranian Relations: External rapprochement and Internal Consolidations. *Middle East Policy*, X(2). <https://mepc.org/journal/saudi-arabian-iranian-relations-external-rapprochement-and-internal-consolidation>
- Sahide, A. (2013a). *Ketegangan Politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah*. The Phinisi Press.
- Sahide, A. (2013b). Konflik Syi'ah Sunni Pasca The Arab Spring. *Kawistara*, 3(3), 27–334. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/kawistara.5225>
- Sahidin, A. (2015). Memahami Sunni dan Syi'ah: Sejarah, Politik dan Ikhtilaf. *Maarif*, 10(2), 31–51. https://www.academia.edu/download/53112093/Jurnal_Maarif_Volume_10_No_2_-_Desember_2015.pdf#page=32
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia. (n.d.). *Basic Law of Governance*. <https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance>
- The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia. (n.d.). *About Saudi Arabia: Islam*. <https://www.saudiembassy.net/islam>
- The Oxford Dictionary of Islam. (n.d.). *Wahhabis*. <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2467>
- VOA Islam. (2016, September 12). *Penganut Syi'ah Banjiri Karbala Irak untuk Laksanakan Ibadah 'Haji Alternatif*. <http://www.voa-islam.com/read/%0Aworld-news/2016/09/12/46134/penganut-%0Asyiah-banjiri-karbala-irak-untuk-laksanakan-ibadahhajialternatif/#sthash.pcB05RBz%0A>